

PENGARUH CSR (DONASI SOSIAL) TERHADAP NILAI PASAR PERUSAHAAN



Linda Syaiful
Mahasiswa Program MM IPB



Prof Dr Noer Azam Achsan
Asisten Direktur MB IPB



Dr Irfan Syaqui Beik
Plt Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB

Banyak pihak, termasuk kalangan industri, yang menganggap bahwa donasi yang dikeluarkan dalam bentuk dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan beban bagi perusahaan. Sehingga pada kenyataannya, banyak perusahaan yang terkesan "setengah hati" dalam menyisihkan sebagian keuntungannya dalam bentuk dana CSR. Kalau pun dana tersebut dikeluarkan, maka otomatis selalu dikaitkan dengan 'biaya' pemasaran produk perusahaan tersebut.

Bagi penulis, ini adalah paradigma yang kurang tepat. Yang harus dikembangkan justru persepsi sebaliknya, bahwa perusahaan sangat membutuhkan untuk mengeluarkan dana CSR ini. Dalam perspektif ekonomi syariah, konsep CSR ini sesungguhnya merupakan realisasi dari konsep infak. Apabila perusahaan ini rajin berinfak, apalagi jika didahului dengan kewajiban zakat perusahaan, maka tentu akan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, termasuk terhadap kondisi perusahaan itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan penulis ini mencoba menguji variabel profitabilitas perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap nilai perusahaan pada industri otomotif di Indonesia pasca terjadinya krisis ekonomi dunia. Profitabilitas perusahaan ditentukan oleh kinerja perusahaan di dalam mengelola sumber daya yang terbatas. Salah satu cara memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memaksimalkan kinerja perusahaan yaitu dengan menjalankan kebijakan modal kerja dan menjaga kinerja keuangan agar tetap baik.

Dalam upaya menjaga kinerja keuangan agar tetap baik maka sering kali perusahaan melakukan eksploitasi sumber-sumber alam secara tidak terkendali sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan alam, yang pada akhirnya akan mengganggu kehidupan manusia dan keberlangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Keberlangsungan hidup perusahaan ditentukan oleh penerimaan masyarakat atas kehadiran perusahaan sehingga konsep CSR ini menjadi sangat penting dan strategis.

Perusahaan otomotif di Indonesia memegang peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Pe-

ngembangan industri otomotif perlu untuk terus dilakukan karena industri otomotif memiliki keterkaitan yang luas dengan sektor ekonomi lainnya dan juga memiliki potensi pasar dalam negeri yang cukup besar. Dengan banyaknya investasi dari industri otomotif dunia sehingga memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian nasional dan penyerapan tenaga kerja profesional di Indonesia serta peningkatan daya saing produk otomotif Indonesia.

Metode penelitian

Sumber data penelitian ini akan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Audit 12 perusahaan pada industri otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengamatan data dilakukan selama kurun waktu 2008 hingga 2013.

Model penelitian menggunakan regresi data panel untuk menganalisis variabel profitabilitas dan pengungkapan CSR yang akan dianalisis, apakah mempunyai pengaruh atau tidak pada nilai perusahaan yang dihitungkan menggunakan rasio *Tobin's q*. Model yang dibangun akan mengikuti model umum sebagai berikut: $MVR_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 CSR_{it} + \alpha_2 OPROA_{it} + \epsilon_{it}$, dimana MVR_{it} menunjukkan *Market Value Ratio*, CSR_{it} menunjukkan pengungkapan nilai CSR, $OPROA_{it}$ menunjukkan *Operating Profit Return on Asset* (persen).

Hasil penelitian

Proses awal dalam metode regresi data panel adalah menentukan pemilihan model dengan menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman. Berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman, menunjukkan analisis dalam penelitian ini lebih lanjut menggunakan model FEM (*Fixed Effect Model*).

Dari hasil pada tabel 1, Uji F menunjukkan nilai- $p < 0.000 < \alpha$ 5 persen, artinya model telah layak digunakan. Kemudian Uji t menunjukkan peubah independen yang berpengaruh signifikan terhadap MVR yaitu variabel pengungkapan CSR dan OPROA karena memiliki nilai-

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
CSR	0.118158	0.056036	2.108608	0.0393
OPROA	0.010040	0.004589	2.187938	0.0327
C	0.949311	0.068897	13.77879	0.0000

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
Weighted Statistics			
R-squared	0.694807	Mean dependent var	2.542132
Adjusted R-squared	0.626402	S.D. dependent var	1.763363
S.E. of regression	0.410514	Sum squared resid	9.774249
F-statistic	10.15722	Durbin-Watson stat	1.656542
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.567612	Mean dependent var	1.137500
Sum squared resid	10.68289	Durbin-Watson stat	0.804246

TABEL 1
HASIL REGRESI DENGAN MODEL FIXED EFFECT

(Prob.) $< \alpha$ 5 persen. Nilai R-Square = 69,48 persen, artinya keragaman yang dapat dijelaskan oleh model sebesar 69,48 persen, dan sisanya 20,52 persen dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Persamaan model regresi panel kedua dalam penelitian ini adalah $MVR = 0,949 + 0,118 CSR + 0,01 OPROA$.

Hasil analisis regresi panel menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara variabel pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan nilai perusahaan. Jika CSR naik 1 persen, maka nilai pasar perusahaan akan naik sebesar 0,118 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di laporan keuangan tahunan perusahaan, menunjukkan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat, sosial dan lingkungan sehingga hal ini dapat menarik investor untuk melakukan penanaman modal di perusahaan otomotif.

Kotler dan Lee (2005) menyatakan bahwa partisipasi perusahaan dalam berbagai bentuk CSR dapat memberikan manfaat bagi perusahaan seperti peningkatan penjualan dan *market share*, memperkuat *brand positioning*, meningkatkan *image* dan pengaruh perusahaan, meningkatkan kemampuan untuk memotivasi dan mempertahankan karyawan, menurunkan biaya operasional, dan meningkatkan keinginan investor untuk berinvestasi.

Hasil penelitian ini didukung oleh Sayekti dan Wondabio (2007) yang membuktikan bahwa pengaruh pen-

gungkanan CSR berpengaruh negatif terhadap *earning response coefficient* sebagai salah satu indikator nilai perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa investor mengapresiasi informasi CSR yang diungkapkan perusahaan dalam laporan tahunannya untuk pengambilan keputusan investasi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan studi Rustiarni (2010), dimana dengan adanya pengungkapan CSR memberikan pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan.

Adapun variabel *operating profit return on asset* (OPROA) diketahui berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan (yang diukur dengan *Tobin's Q Ratio*). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah dan Abdanti (2012). Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka semakin besar tingkat kemakmuran yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham. Semakin besar tingkat kemakmuran yang diberikan oleh perusahaan akan menarik minat investor untuk memiliki perusahaan tersebut dan akan memberikan pengaruh positif terhadap harga saham di pasar. Ini berarti akan menaikkan nilai perusahaan.

Penguatan edukasi

Hasil studi di atas menunjukkan bahwa secara empiris pada kasus industri otomotif, pengungkapan dana CSR secara transparan dalam laporan perusahaan telah menaikkan nilai pasar dari perusahaan. Ini berarti bahwa logika "berbagi sebagai beban" telah menjadi cara berpikir yang tidak relevan dengan perkembangan yang ada. Justru berbagi adalah cara untuk meningkatkan *market value* yang akan mengundang investasi lebih besar lagi pada perusahaan.

Untuk itu, diperlukan adanya penguatan edukasi dan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan yang ada untuk senantiasa memikirkan lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Penunai kewajiban zakat perusahaan maupun donasi sosial dalam bentuk CSR merupakan cara efektif dalam merealisasikan hal tersebut. Penulis juga merekomendasikan agar studi sejenis yang dikembangkan pada industri lain dapat dilakukan. Wallahu a'lam. ■

TSAQOFI

Memaknai Kemiskinan



Dr Irfan Syaqui Beik
Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

Isu kemiskinan adalah isu yang sangat strategis bagi sebuah negara. Tidak ada satu pun negara di dunia ini yang tidak menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan yang dilakukannya. Bahkan di negara yang paling maju sekalipun, isu kemiskinan tetap menjadi salah satu isu yang sangat sensitif, yang kalau tidak dikelola dengan baik, berpotensi menimbulkan gejolak sosial politik yang akan merugikan negara.

Beragam pendekatan dan kebijakan telah dilakukan oleh masing-masing negara, dengan titik berangkat yang berbeda-beda. Ada negara yang memulai dengan membangun sektor pendidikan terlebih dahulu, karena meyakini bahwa problem kemiskinan sangat erat kaitannya dengan kualitas SDM, sehingga mobilitas vertikal dapat dilakukan manakala kualitas SDM-nya mengalami peningkatan kualitas yang signifikan. Ada pula negara yang memulainya dengan membangun infrastruktur, karena meyakini bahwa kemiskinan itu sangat terkait dengan persoalan infrastruktur, baik infrastruktur informasi, transportasi, hingga akses pasar barang dan jasa. Pendeknya, setiap pemerintahan di dunia berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Pada tingkatan yang paling ekstrim, suatu pemerintahan bahkan dapat mengalokasikan segala macam cara, termasuk mengakuisisi aset-aset strategis yang ada di negara lain, demi memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya sendiri. Hal inilah yang kemudian sering memicu konflik internasional, yang ujungnya menciptakan perang, baik perang fisik maupun perang non fisik. Karena itu, setiap negara memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing, yang salah satu pilarnya adalah pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.

Namun yang menarik, hampir seluruh negara di dunia menggunakan parameter yang bersifat fisik dalam mengukur kemiskinan. *Basic needs approach*, yang umumnya terbagi atas kebutuhan dasar produk makanan dan kebutuhan dasar produk bukan makanan, menjadi konsep yang paling populer untuk digunakan, termasuk di Indonesia. BPS sebagai institusi resmi penyedia data ekonomi dan keuangan negara, juga menggunakan pendekatan *basic needs* ini sebagai dasar penetapan garis kemiskinan. Sehingga, garis kemiskinan didefinisikan sebagai agregasi dari

garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKBM). Kontribusi GKM terhadap garis kemiskinan rata-rata mencapai angka antara 70-75 persen, sementara sisanya adalah hasil sumbangan GKBM. Pada level internasional, komparasi tingkat kemiskinan antar negara pun dibuat atas dasar pendekatan kebutuhan dasar ini.

Sedangkan pada tingkatan mikro, yakni individu, persepsi tentang kemiskinan juga didominasi pada pendekatan yang bersifat fisik material. Sehingga, ketika seseorang ingin keluar dari kubangan kemiskinan, maka yang menjadi ukurannya adalah pada pencapaian material yang dilakukannya. Karena fokusnya hanya pada aspek material, maka pola berpikirnya adalah pola sebagai *receiver* dan bukan *giver*. Dominasi cara berpikir sebagai *receiver* ini pada akhirnya akan menempatkan konsep berbagi menjadi sebuah beban yang memberatkan. Akibatnya, berbagi tidak menjadi prioritas. Untuk itu, perlu kiranya kita memahami konsep kemiskinan dengan benar menurut perspektif syariah.

Kemiskinan menurut syariah

Dalam ajaran Islam, kemiskinan pada dasarnya merupakan bagian yang integral dari *sunnatullah fil hayah*, atau *sunnatullah* kehidupan. Tidak mungkin kemiskinan itu bisa dihilangkan seratus persen dari muka bumi, karena memang antara manusia yang satu dengan yang lainnya diberikan kemampuan yang berbeda-beda dalam mencari rezeki. Dalam QS Az-Zukhruf: 32, Allah SWT telah menegaskan bahwa la telah menentukan sumber penghidupan (penghasilan) bagi manusia dimana sebagian lebih tinggi dibandingkan sebagian yang lain, dengan tujuan agar mereka yang mendapat amanah lebih tinggi itu menggunakan kelebihannya itu untuk membantu mereka yang lebih lemah. Karena itu, yang menjadi tanggung jawab kita adalah bagaimana meminimalisir agar kesenjangan antara kelompok mampu dengan kelompok tidak mampu, dan agar kemiskinan yang terjadi bukan disebabkan oleh ketidakadilan sistem.

Ini baru pendekatan yang sifatnya fisik material. Pada sisi *ruhiyah* (moral spiritual) kemiskinan juga dapat terjadi ketika seseorang secara sadar dan sengaja tidak melaksanakan segala ketentuan Allah SWT. Orang yang tidak mau melaksanakan shalat wajib, puasa wajib maupun

zakat padahal telah memenuhi syarat, termasuk ke dalam kelompok yang miskin secara rohani. Demikian pula dengan sifat buruk seperti tamak, yang dalam sebuah hadits dikatakan sebagai salah satu bentuk nyata dari kemiskinan jiwa.

Dengan konsepsi ini, maka ada empat tipologi manusia yang mungkin muncul. Yaitu, tipologi manusia yang kaya materi dan kaya rohani, miskin materi dan kaya rohani, kaya materi dan miskin rohani, serta miskin materi miskin rohani. Inilah yang dalam studi kami disebut dengan CIBEST Quadrant. Tipologi pertama (kuadran 1) disebut dengan kuadran sejahtera, kuadran kedua disebut kemiskinan material, kuadran ketiga kemiskinan spiritual, dan kuadran keempat disebut kemiskinan absolut.

Adapun kriteria agar seseorang

kaya secara rohani antara lain pertama, suka beribadah dan mendoakan orang lain, ini sejalan dengan pernyataan Ali bin Thalib ra yang menegaskan bahwa doa kaum dhua'fa termasuk pilar kehidupan yang sangat penting bersama keadilan para pemimpin, kedermawanan para orang kaya, keilmuan para ulama dan kejujuran para birokrat. Kedua, tidak suka meminta-minta karena malas. Ini sejalan dengan sabda Nabi SAW yang menyatakan bahwa orang yang suka meminta-minta karena malas, maka pada hari kiamat akan kehilangan wajahnya. Ketiga, suka berinfak meskipun sangat sedikit jumlahnya. Ini sejalan dengan firman Allah dalam QS Al-Imran: 134, yang memerintahkan kita untuk berbagi di saat lapang (kaya) maupun di saat sempit (miskin). Wallahu a'lam. ■

Pendaftaran!!!

Training Perbankan dan Keuangan Syariah

Manfaat Kegiatan

- Berkesempatan dalam berkarir di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
- Berkesempatan belajar langsung dengan pakar dan praktisi LKS
- Memperoleh sertifikat yang akan menunjang karir di LKS
- Memperoleh pembelajaran teori dan praktek langsung operasional di LKS
- Berkesempatan magang (1 bulan) di LKS yang mempunyai mutu dan reputasi terbaik dibidangnya.
- Menambah percaya diri dan tingkat profesionalitas dalam dunia kerja di LKS

Persyaratan Peserta

- Mengisi Formulir Pendaftaran di kantor CIBEST IPB atau via email, dengan mengirimkan permohonan pendaftaran ke ipb.cibest@yahoo.com paling lambat tanggal 24 Maret 2015 (tempat terbatas untuk 15 orang per angkatan)
- Melampirkan pas foto berwarna dengan ukuran 2x3 dan 3x4 (masing-masing 3 lembar), serta fotokopi KTP/KTM dan Ijazah pendidikan terakhir (masing-masing 1 lembar).
- Training akan dilaksanakan:
 - a) Angkatan II: 30 Maret - 6 Mei 2015
 - b) Angkatan III: 27 April - 4 Juni 2015
 - c) Angkatan IV: 27 Juli - 2 Sept 2015
 - d) Angkatan V: 24 Agus - 7 Okt 2015
- Tempat pelatihan di Kampus IPB Baranangsiang-Bogor dan tempat magang yang telah ditentukan oleh panitia.
- Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 100.000,- paling lambat tanggal 27 Maret 2015 yang ditransfer ke Rekening CIBEST 1230001661 a.n. Cibest LPPM IPB (Bank Mu'amat Indonesia).
- Membayar biaya training sebesar Rp 1.750.000 paling lambat 27 Maret 2015.
- Formulir dan berkas-berkas dikirim langsung atau via email atau pos ke sekretariat pelaksana paling lambat 24 Maret 2015.

Instruktur Ahli
Dr. Irfan Syaqui Beik, (Pakar Ekonomi dan Perbankan Syariah)
Dr. Jusaid Effendi, (Pakar Keuangan Mikro dan Koperasi Syariah)
M. Abdul, MSI (Praktisi Ahli Perbankan Syariah) dan lainnya.

Sekretariat Pelaksana:
CIBEST IPB, Kampus IPB Baranangsiang, Jl. Raya Pajajaran, Bogor Jawa Barat
Telp/Fax: 0251-8345861
Email: ipb.cibest@yahoo.com

Contact Person:
- Bussid (0811-7196-80)
- Dwi Yulianthi (0813-8491-6175)
- Thuha Jazil (0812-9147-0641)

Facilities

- Training Kit
- Sertifikat
- Snack dan Makan Siang (Selama In Class)
- Magang di LKS

Penyebab Krisis Keuangan dan Bagaimana Mencegahnya DALAM PERSPEKTIF ISLAM



Ascarya
Senior Researcher
Pusat Riset dan
Edukasi Bank Sentral
(PRES),
Bank Indonesia

Krisis keuangan telah terjadi sejak 1825 di Inggris karena penetakan uang kertas yang melebihi emas dan perak sebagai back up-nya. Krisis keuangan yang terjadi dewasa ini hanya pengulangan krisis keuangan sebelumnya. Leaven dan Valencia (2012) mencatat, dalam kurun waktu 1970-2011 sejak runtuhnya Bretton Woods Agreement, adanya 431 krisis keuangan yang meliputi 218 krisis mata uang, 147 krisis perbankan, dan 66 krisis utang luar negeri, termasuk 68 krisis ganda dan 8 krisis triplek.

Tampaknya mereka belum mengambil pelajaran dari krisis keuangan yang terus berulang ini tentang bagaimana membasmi dan/atau mengendalikan krisis keuangan. Meskipun krisis keuangan telah berulang terus menerus, tak satu pun dari negara-negara yang terkena krisis keuangan yang kemudian menjelma menjadi ekonomi kuat dan lebih stabil. Lipson (2010) berpendapat bahwa krisis keuangan saat ini hanya tayangan ulang krisis sebelumnya dimana kita telah gagal untuk mengambil pelajaran kita. Tampaknya terdapat kesenjangan teoritis, yang mencegah penemuan solusi yang efektif untuk mengakhiri krisis keuangan. Terdapat juga kesenjangan manajerial, yang gagal untuk belajar dari sejarah, sehingga krisis akan terus berulang dan terus mengongcang sistem keuangan.

Oleh karena itu, harus ada kajian komprehensif dan holistik untuk mengetahui akar penyebab krisis keuangan agar dapat mencegahnya dan menghindari kesalahan serupa terjadi di masa depan.

Akar penyebab krisis keuangan

Krisis keuangan dapat terjadi karena fenomena alam, seperti musim kering atau bencana alam, dan karena berbagai kesalahan manusia. Pertama, karena penurunan nilai mata uang dengan mengurangi kadar dan/atau berat uang emas dan perak, serta dengan penggunaan uang kertas tanpa back up emas yang setara (uang fiat). Dewasa ini, uang fiat telah menjadi mata uang utama di mana-mana tanpa back up. Kedua, karena diciptakannya fractional reserve banking system (FRB) yang dapat melipatgandakan uang simpanan nasabah belasan kali. Dewasa ini, FRB diterapkan oleh semua bank di dunia, termasuk bank Syariah. Ketiga, karena adanya utang luar negeri Negara yang semakin menumpuk dan tidak mungkin terbayar. Keempat, karena diciptakannya pasar modal dimana spekulasi dapat dilakukan oleh sebagian besar pelakunya, sehingga menye-

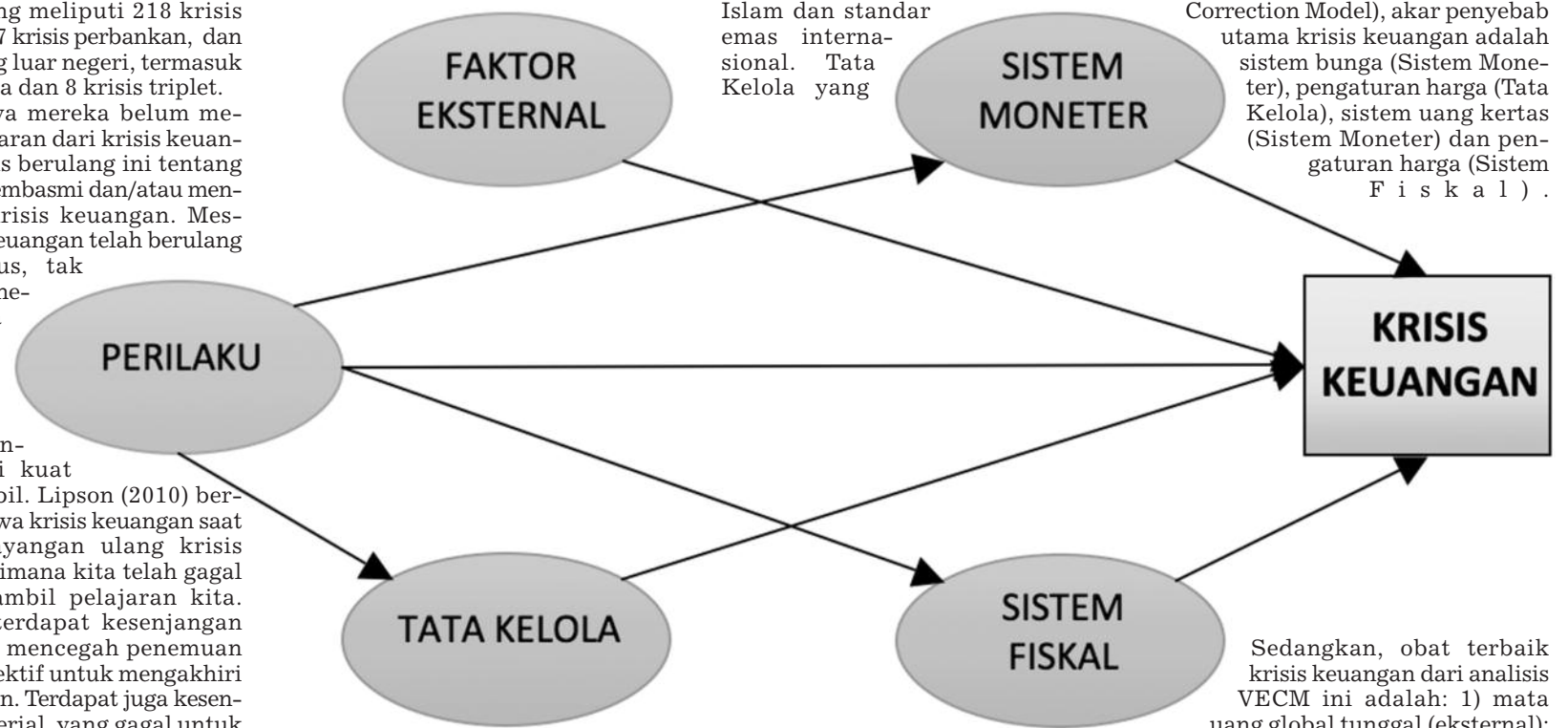
babkan crash berulang-ulang, dan tercatat 232 kali menurut Barro dan Ursua (2009). Kelima, karena diciptakannya produk derivatives yang dapat menciptakan uang dari tagihan melalui sekuritisasi berulang, sehingga menyebabkan krisis keuangan global sejak 2008.

Dalam perspektif Islam, krisis keuangan terjadi karena perintah Allah diabaikan dan larangan Allah dilanggar oleh pelaku ekonomi dalam ber-muamallah,

aspek juga, yaitu: 1) Kontrol Perilaku; 2) Kontrol Eksternal; 3) Tata Kelola yang Baik; 4) Sistem Moneter yang adil; dan 5) Sistem Fiskal yang Berkesinambungan. Kontrol Perilaku meliputi: edukasi dan dakwah, supervisi, penegakan aturan, kontrol diri, menghindari hutang dan infaq dan sedekah. Kontrol Eksternal meliputi: manajemen krisis dan bencana alam, perdagangan luar negeri yang adil, manajemen devisa, area perdagangan bebas Islami, uni ekonomi Islam dan standar emas internasional. Tata Kelola yang

dan defisit fiskal berlebih), Tata Kelola (kelemahan administrasi dan kelemahan regulasi) dan Sistem Moneter (sistem perbankan fraksional dan sistem uang kertas), disusul oleh Faktor Eksternal (siklus bisnis dan bencana alam) dan Perilaku (spekulasi dan individualis). Selain itu, Perilaku dari pelaku ekonomi juga memicu krisis keuangan melalui pengaruhnya ke aspek Tata Kelola, Sistem Moneter dan Sistem Fiskal.

Dari analisis VECM (Vector Error Correction Model), akar penyebab utama krisis keuangan adalah sistem bunga (Sistem Moneter), pengaturan harga (Tata Kelola), sistem uang kertas (Sistem Moneter) dan pengaturan harga (Sistem Fiskal).



khususnya pelarangan *riba*, *maysir* dan *gharar* dalam berbagai bentuknya, penegakan kewajiban zakat, serta perilaku menyimpang pelaku ekonomi dalam bertransaksi.

Studi literatur

Dari puluhan studi dapat dirangkum akar penyebab krisis keuangan dalam perspektif Islam, yang dapat dikelompokkan kedalam lima aspek utama, yaitu: 1) Perilaku; 2) Faktor Eksternal; 3) Tata Kelola; 4) Sistem Moneter; dan 5) Sistem Fiskal. Perilaku meliputi: keserakahan, individualis, hedonis, spekulasi, kriminal dan ekspektasi berlebihan. Eksternal meliputi: siklus bisnis, bencana alam, penularan krisis, sistem moneter internasional dan instabilitas politik. Tata Kelola meliputi: kelemahan administrasi, korupsi, pengaturan harga, kelemahan regulasi dan kurangnya keterbukaan. Sistem Moneter meliputi: sistem bunga, sistem uang kertas, sistem perbankan fraksional, sistem leverage dan kartu kredit. Sistem Fiskal meliputi: defisit fiskal berlebih, pajak berlebih, utang pemerintah berlebih dan pengeluaran berlebih.

Sementara itu, dari puluhan studi dapat dirangkum solusi krisis keuangan dalam perspektif Islam yang dapat dikelompokkan kedalam lima

GAMBAR 1 AKAR PENYEBAB KRISIS KEUANGAN

baik meliputi: transparansi, kredibilitas, akuntabilitas, kontrol internal, lembaga Hisbah dan penempatan yang tepat. Sistem Moneter yang Adil meliputi: pelarangan *riba*, sistem uang dengan standar emas, sistem perbankan 100% cadangan, pelarangan *maysir*, efek beragun aset dan debit card. Sistem Fiskal yang Berkesinambungan meliputi: penegakan sistem zakat, redistribusi aset tidur, sistem pajak Islam, sistem budget berimbang, manajemen komoditi utama dan sukuk bagi hasil.

Hasil dan analisis

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa akar penyebab krisis keuangan adalah kelemahan mendasar dan struktural karena pelanggaran perintah dan larangan Allah khususnya pelarangan *riba*, *maysir* dan *gharar*, serta perilaku dalam berbagai bentuknya. Dari analisis SEM (Structural Equation Modeling) diperoleh bahwa ke-lima aspek tersebut di atas dengan semua indikatornya terbukti menyebabkan krisis keuangan, terutama Sistem Fiskal (pengeluaran berlebih

Sedangkan, obat terbaik krisis keuangan dari analisis VECM ini adalah: 1) mata uang global tunggal (eksternal); dan 2) sistem bagi hasil (Moneter).

Dari analisis ANP (Analytic Network Process), solusi krisis keuangan dalam perspektif Islam adalah reformasi fundamental dan struktural yang meliputi: 1) pelarangan *riba* dan *maysir* dalam berbagai bentuknya (Sistem Moneter yang Adil); 2) penegakan sistem zakat dan rediteusi aset tidur (Sistem Fiskal yang Berkesinambungan); 3) edukasi dan dakwah serta penegakan aturan (Kontrol Perilaku); manajemen devisa dan uni ekonomi Islam (Kontrol Eksternal); dan kredibilitas dan transparansi (Tata Kelola yang Baik).

Dengan demikian, hal-hal yang dapat dilakukan pemerintah antara lain: 1) meningkatkan cadangan emas secara gradual untuk mengurangi dampak *riba* di sistem uang kertas; 2) meningkatkan giro wajib minimum bank secara gradual untuk mengurangi dampak *riba* di sistem perbankan; 3) meningkatkan pangsa keuangan dan perbankan Syariah dan sistem bagi hasilnya; 4) membatasi spekulasi dan produk *derivatives*, serta mendorong penerbitan efek beragun aset untuk mengurangi dampak *maysir*; dan 5) memperbaiki penegakan sistem zakat dan wakaf secara gradual diawali dengan menyusunkan *zakah core principles* dan *waqf core principles*. Wallahu a'lam. ■

TAMKINIA

Ekonomi Sedekah dan Keuangan Rumah Tangga



Laily Dwi Arsyianti
Dosen Prodi Ekonomi
Syariah FEM IPB dan
Mahasiswa S3 Institute
of Islamic Banking and
Finance (IIBF) IIU
Malaysia

Belakangan ini banyak kisah inspiratif telah beredar di media sosial. Di antaranya adalah seorang supir angkot yang mempersilakan menggunakan jasa angkutannya kepada calon penumpang, yaitu seorang ibu dan anaknya, yang dengan sejujurnya menyatakan bahwa uang yang mereka miliki tidak mencukupi untuk membayar ongkos jasa angkutan kota tersebut. Namun ternyata ada penumpang lain yang memerhatikan mereka dan kemudian membayarkan ongkos untuk mereka dengan jumlah yang berlebih.

Kisah inspiratif yang lain ditunjukkan dengan seorang penjual soto yang melayani calon pelanggan, juga, seorang ibu dan dua anaknya, yang dengan jujur menyatakan bahwa uangnya tidak mencukupi dan hanya meminta porsi soto yang sesuai dengan anggaran yang dimilikinya. Namun penjual soto dengan kebaikannya memberi porsi penuh untuk mereka tanpa mereka harus membayar jasa dan produk sotonya. Kejadian ini rupanya diperhatikan oleh pelanggan sotonya yang lain, yang kemudian membayarkan jasa dan soto yang telah diterima oleh ibu dan dua anaknya tersebut.

Kedua kisah di atas menggambarkan bahwa tidak mustahil sebuah kebaikan yang berupa sedekah akan mampu menggerakkan perdagangan. Jika supir angkot dan penjual soto tidak memberikan sedekahnya, maka tidak

ada transfer barang dan jasa kepada kedua ibu dan anak-anak mereka. Bahkan kemudian sedekah ini mengundang sedekah yang lain sehingga tidak mengurangi pendapatannya bahkan supir angkot dan penjual soto tersebut menerima pendapatan yang berlebih, alias surplus. Di masa yang akan datang, kedua penaja jasa dan produk tersebut akan mampu bertransaksi barang dan jasa lebih banyak melalui surplus yang diterimanya.

Transaksi barang dan jasa merupakan kegiatan kita sehari-hari. Cara pertukaran barang dan jasa yang familiar bagi kita adalah dengan tunai atau menunda pembayaran dengan kredit, dengan kata lain, utang. Kedua cara ini jauh lebih familiar dibandingkan cara sedekah. Paling tidak, seorang ibu rumah tangga akan berbelanja satu kali sehari, baik secara tunai maupun utang. Namun sangat jarang yang memasukkan sedekah dalam list prioritas alokasi rumah tangga hariannya.

Pada umumnya, prioritas alokasi rumah tangga tidak jauh dari tabungan, konsumsi, dan investasi. Rumah tangga Indonesia selama tahun 2014 telah menghabiskan 55.8 persen untuk konsumsi dari GDP. Sementara itu, untuk semua kategori rumah tangga, rata-rata pengeluaran rumah tangga per pendapatan *disposable* adalah sekitar 92 persen. Jadi, dari 100 ribu rupiah pendapat-

atan yang siap dipakai, 92 ribu rupiah habis untuk pengeluaran konsumsi. Konsumsi tersebut termasuk konsumsi untuk produk tidak tahan lama (*indurable goods*) dan produk tahan lama (*durable goods*). Produk tidak tahan lama biasanya dibayar dengan tunai karena manfaatnya hanya dapat dirasakan dalam waktu singkat. Contoh produk tidak tahan lama adalah makanan dan jasa transportasi, termasuk juga jasa asisten rumah tangga. Produk ini digunakan setiap hari dan transaksinya biasanya juga terjadi setiap hari. Sangat kecil peluang perubahan status konsumsinya menjadi investasi. Sementara itu, produk tahan lama merupakan barang dan jasa yang manfaatnya bisa dirasakan tiga tahun atau lebih. Contoh produk tahan lama adalah furniture, perlengkapan dan peralatan dapur, alat elektronik rumah tangga, termasuk computer dan telepon. Peluang perubahan status konsumsinya menjadi investasi lebih besar dibandingkan produk tidak tahan lama.

Ada beberapa produk yang bisa masuk ke dalam kedua kategori, tergantung pada acara konsumen memandang manfaatnya. Sebagai contoh, pakaian. Jika manfaat pakaian dilihat dari kemampuannya dalam perlindungan tubuh, kenyamanan, dan penghematan maka pakaian akan dapat dinikmati dalam jangka relatif panjang. Namun, jika pakaian dilihat dari sisi estetika dan

trend, maka dalam waktu singkat ia sudah tidak bermanfaat. Pada kenyataannya, memang sebagian kelompok lebih termotivasi pada tingkat estetika pakaiannya yang mungkin akan bermanfaat bagi kebahagiaan dirinya secara psikologis yang pada akhirnya mampu menyumbangkan nilai kesehatan bagi dirinya. Dari sinilah industri fashion berkembang.

Hal apa lagi yang mampu membuat produk tidak tahan lama yang dikategorikan konsumsi mampu berubah menjadi investasi? Jawabannya adalah sedekah. Sebagaimana dua kisah yang diceritakan di awal tadi, sedekahnya supir angkot dan penjual soto mampu menjadi investasi baik bagi mereka sendiri maupun bagi orang lain, sehingga manfaat yang diterima bukan hanya dinikmati oleh dirinya sendiri melainkan juga orang lain. Sementara itu, tabungan hanya mampu memberikan manfaat bagi dirinya saja. Paling tidak, manfaat tabungan terlebih dahulu dinikmati oleh penabung, baru kemudian orang lain. Dengan demikian, prioritas yang lebih utama dalam alokasi pendapatan rumah tangga sebenarnya adalah sedekah dibandingkan tabungan. Produk yang secara alamiah hanya mampu dirasakan manfaatnya dalam waktu singkat, dengan sedekah, produk tersebut mampu dinikmati manfaatnya dengan lebih lama dan lebih banyak orang. Wallahu a'lam. ■

Pengaruh Suku Bunga Deposito Bank Konvensional TERHADAP BAGI HASIL DEPOSITO BANK SYARIAH



Erma Fatima
Alumnus S1 Ekonomi Syariah FEMIPB



Dr Iman Sugema
Dosen IE - FEM IPB



Deni Lubis
Dosen Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

Aset perbankan syariah Indonesia pada Oktober 2013 telah mencapai 235 triliun rupiah. Namun, nilai ini masih sangat kecil, yaitu sekitar 4.88 persen dari keseluruhan aset perbankan nasional. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia kemungkinan masih terpengaruh dengan keberadaan sistem perbankan konvensional yang ada. Hal ini dikarenakan sistem perbankan di Indonesia masih mengacu pada BI rate.

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan salah satu input bagi operasional perbankan. Perkembangan DPK ini tentunya dipengaruhi oleh besar *market share* perbankan, baik itu perbankan syariah maupun perbankan konvensional. Jumlah DPK yang semakin meningkat mencerminkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat untuk menitipkan dananya di bank semakin meningkat dan kinerja dari bank tersebut juga semakin baik.

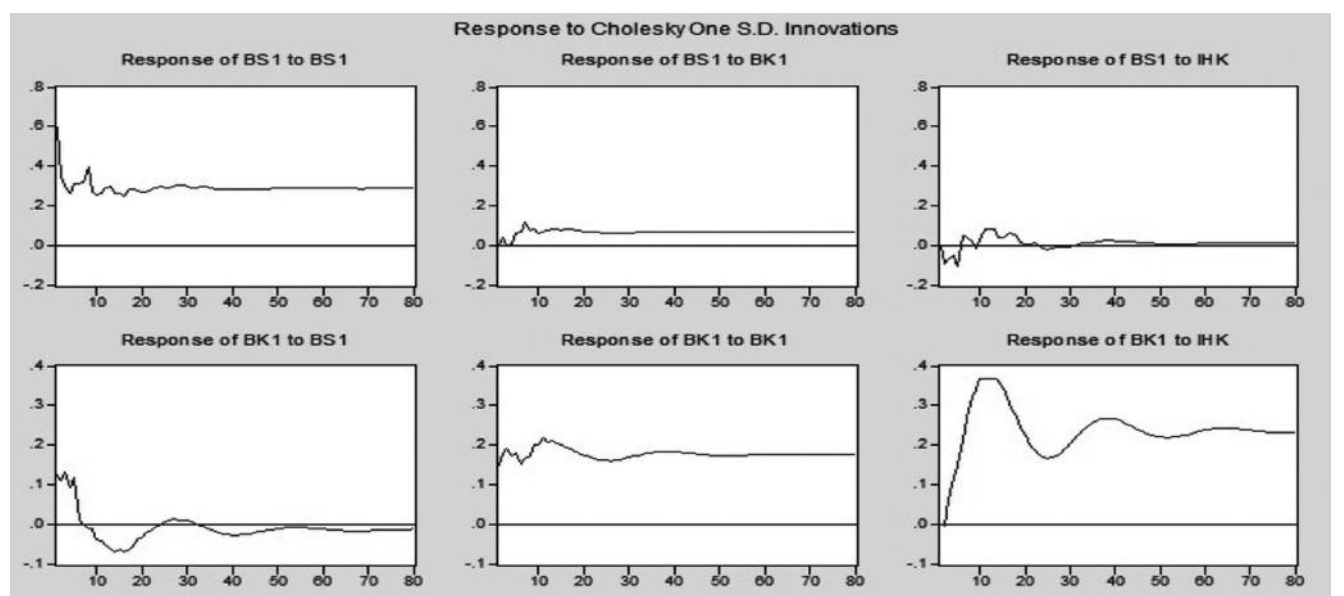
Adanya keterkaitan antara bagi hasil bank syariah dan suku bunga bank konvensional mencerminkan bahwa *market share* bank syariah masih sangat sedikit jika dibandingkan *market share* bank konvensional. Dalam rangka memenangkan persaingan untuk menarik investor, seringkali lembaga keuangan syariah menyamakan bagi hasil yang ingin diberikan kepada investornya dengan tingkat bunga simpanan yang diberikan bank konvensional kepada nasabahnya (Perwataatmajaya dan Tanjung 2007). Penelitian ini berusaha menganalisis pengaruh tingkat suku bunga deposito perbankan konvensional terhadap tingkat bagi hasil deposito perbankan syariah.

Metode dan pembahasan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk deret waktu bulanan (*monthly time series*) periode Februari 2009 sampai dengan Februari 2014. Data bank konvensional dalam penelitian ini mengacu pada data bank umum konvensional Indonesia sedangkan data bank syariah mengacu pada data bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia.

Data diperoleh melalui Statistik Perbankan Indonesia (SPI) Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah (SPS) Bank Indonesia dan *website* Bank Indonesia (BI). Selain itu penulis juga melakukan studi pustaka dengan membaca jurnal, artikel internet, buku, dan berbagai literatur lainnya yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Variabel yang digunakan adalah tingkat suku bunga deposito bank konvensional, tingkat bagi hasil deposito bank syariah, dan indeks harga konsumen (IHK) Indonesia dengan tahun dasar 2012.

Metode yang digunakan adalah metode VECM. Hasil analisis menun-



GAMBAR 1 GRAFIK IRF DEPOSITO 1 BULAN

jukkan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antara tingkat bagi hasil deposito bank syariah dengan tingkat suku bunga bank konvensional pada semua model deposito berjangka 1 bulan.

Analisis Impulse Response Function (IRF)

Model deposito 1 bulan dalam Gambar 1 menunjukkan pengaruh guncangan tingkat suku bunga deposito bank konvensional sebesar satu standar deviasi terhadap tingkat bagi hasil deposito bank syariah menunjukkan respon positif, hal ini terlihat dari guncangan tingkat suku bunga deposito bank konvensional menyebabkan tingkat bagi hasil deposito bank syariah meningkat sebesar 0.113 persen pada periode ke-12 dan menjadi stabil pada periode ke-37 sebesar 0.067 persen. Sedangkan pengaruh guncangan tingkat bagi hasil deposito bank syariah sebesar satu standar deviasi terhadap tingkat suku bunga deposito bank konvensional terlihat lebih fluktuatif dan cenderung negatif. Respon mulai stabil pada periode ke-58 sebesar 0.011 persen.

Dari hasil IRF pada model deposito 1 bulan menunjukkan bahwa respon tingkat suku bunga deposito bank konvensional terhadap guncangan yang terjadi pada tingkat bagi hasil deposito bank syariah menunjukkan derajat yang lebih kecil dari pada respon tingkat bagi hasil deposito bank syariah terhadap guncangan yang terjadi pada tingkat suku bunga deposito bank konvensional. Hal ini disebabkan karena *market share* bank konvensional di Indonesia yang masih lebih besar dari pada bank syariah. Sedangkan respon tingkat suku bunga deposito bank konvensional dan tingkat bagi hasil deposito bank syariah terhadap IHK, terlihat bahwa tingkat suku bunga deposito

bank konvensional memberi respon yang lebih besar dan cenderung stabil pada periode yang lebih lama.

Analisis Forecast Error Variance Decomposition (FEVD)

Berdasarkan hasil dekomposisi varian, dapat disimpulkan bahwa pada periode pertama, fluktuasi tingkat bagi hasil deposito 1 bulan bank syariah disebabkan oleh guncangan variabel itu sendiri, yakni sebesar 100 persen. Namun mulai periode kedua hingga periode seterusnya, tampak variabel-variabel lain mulai memengaruhi variabilitas tingkat bagi hasil deposito 1 bulan. Pada gambar terlihat bahwa hingga periode terakhir fluktuasi tingkat bagi hasil masih dominan dipengaruhi oleh guncangan variabel itu sendiri, guncangan tingkat suku bunga deposito bank konvensional dan IHK hingga periode terakhir hanya berpengaruh sebesar 4.91 persen dan 1.11 persen.

Sedangkan fluktuasi tingkat suku bunga deposito 1 bulan bank konvensional sudah mulai dipengaruhi variabel lain yakni tingkat bagi hasil deposito 1 bulan pada periode pertama sebesar 41.19 persen. Namun, peranan guncangan tingkat bagi hasil hingga periode terakhir semakin menurun dan fluktuasi tingkat suku bunga deposito mulai didominasi oleh IHK, yakni sebesar 64.02 persen.

Berdasarkan hasil uji FEVD, dapat diketahui bahwa tingkat suku bunga bank konvensional di Indonesia secara signifikan memengaruhi dalam penentuan margin bagi hasil di bank syariah. Sedangkan dalam menjelaskan fluktuasi tingkat suku bunga deposito bank konvensional di Indonesia, peranan tingkat bagi hasil masih sangat kecil dalam semua deposito berjangka. Hal ini disebabkan karena masih tingginya *market share* bank konvensional di Indonesia dibandingkan dengan bank syariah sehingga

apabila terjadi guncangan pada tingkat bagi hasil bank syariah maka tidak terlalu berpengaruh terhadap fluktuasi yang terjadi pada tingkat suku bunga deposito bank konvensional di Indonesia.

Dalam kaidah hukum satu harga atau *the law of one price*, harga suatu produk cenderung sama di semua daerah. Jika dihubungkan dengan hukum tersebut maka wajar apabila tingkat bagi hasil deposito bank syariah menyesuaikan dengan tingkat suku bunga deposito bank konvensional. Sebab sebagai makhluk ekonomi, seorang nasabah akan cenderung memilih produk yang lebih menguntungkan. Oleh karena itu dalam dunia perbankan terjadi persaingan dalam penentuan tingkat margin atau tingkat keuntungan yang akan diberikan bank untuk nasabahnya. Hal ini terjadi karena bank tidak ingin nasabahnya beralih menggunakan produk dari bank yang lain.

Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerapan dana pihak ketiga dari bank syariah masih tergolong rendah jika dibandingkan bank konvensional. Hal ini dilihat dari masih besarnya pengaruh suku bunga deposito bank konvensional terhadap tingkat bagi hasil bank syariah. Oleh karena itu bank syariah harus meningkatkan inovasi-inovasi produk untuk menarik para nasabah sehingga dapat meningkatkan *market share* bank syariah baik dalam segi aset maupun DPK-nya.

Tingkat bagi hasil bank syariah baiknya tidak lagi mengacu pada suku bunga bank konvensional, melainkan ditetapkan berdasarkan keuntungan bank syariah serta disesuaikan dengan keadaan pasar dan kemampuan/ daya beli barang dan jasa pada masyarakat. *Wallahu a'lam.*

BUKAN TAFSIR



Dr Iman Sugema
Dosen IE FEM IPB



Dr M Iqbal Irfany
Dosen IE-FEM IPB

Seorang kolega praktisi ekonomi syariah menggeluh akan banyaknya rekan beliau silih berganti berhenti bekerja dari lembaga keuangan syariah. Alasan mereka *resign* bisa beragam. Umumnya *turn-over* karyawan di suatu lembaga keuangan cukup tinggi apalagi bagi para pekerja baru di beberapa tahun pertama bekerja. Para pekerja *fresh graduate* tabiatnya terus mencari jenis pekerjaan yang cocok dengan kompetensi atau orientasi dan visi hidup masing-masing masing-masing. Dari *curhatan* di media sosial, salah satu motif utama seorang bankir bekerja di suatu lembaga keuangan syariah adalah harapan mereka melakukan pekerjaan di lingkungan agamis yang sejalan dengan tuntunan syariah, sambil terus meningkatkan kapasitas diri serta berperan dalam perkembangan ekonomi umat dan edukasi masyarakat akan alternatif transaksi non-ribawi.

Namun ada pula yang beralasan berhenti atau pindah ke pekerjaan lain karena merasa impian, peningkatan kapasitas pribadi, budaya organisasi, tak disesuaikan dengan harapan, visi hidup dan idealisme seperti yang terbayang sebelumnya. Mereka yang beralasan seperti ini men-

anggap bahwa budaya dan etos kerja di bank syariah tak jauh berbeda dengan bank konvensional. Kalaupun tak mengkhawatirkan, fenomena dan anggapan ini tentu saja patut kita jadikan catatan tersendiri. Perkembangan keuangan syariah sejatinya lahir sebagai antitesa atas lembaga keuangan konvensional dengan seperangkat keunggulan terkait aspek moral-positif yang ditawarkan. Kata 'syariah' sendiri secara stilah agama berarti 'jalan menuju kebenaran dan kebaikan'.

Kami tak bermaksud melakukan generalisasi bahwa seluruh lembaga keuangan syariah sama saja dengan lembaga keuangan konvensional. Dengan berbagai kekurangan yang masih ada, banyak penciri yang bisa membedakan tata nilai dan budaya organisasi lembaga keuangan syariah berbeda bahkan lebih superior, termasuk bagaimana penciri sumber daya insani (SDI) syariah.

Secara kuantitas, permintaan terhadap SDI syariah sebenarnya tak perlu dikhawatirkan bahkan *trend*-nya terus saja meningkat. Demikian pula dari sisi *supply*, tak kurang minat para praktisi lembaga konvensional yang ingin beralih ke unit syariah. Banyak bank konvensional bahkan melakukan ekspansi

pembukaan unit syariah yang berimplikasi kebutuhan SDI syariah terus bertambah. Fenomena yang sama juga terlihat di berbagai sekolah tinggi ekonomi Islam dan universitas, jurusan ekonomi syariah tak kekurangan peminat bahkan termasuk favorit bagi calon mahasiswa baru.

Namun SDI lembaga keuangan syariah bukan hanya terkait kuantitas saja. Kualitas insani adalah urgensi lain yang sangat terkait dengan sistem tata nilai, orientasi, dan budaya korporat yang menentukan bagaimana organisasi berjalan, termasuk terkait karakter dan pengelolaan sumber daya manusianya.

Visi dan karakter perusahaan (misalnya tak hanya berorientasi profit), mekanisme hubungan antarmanusia/karyawan serta kesesuaian terhadap aturan *syara'* adalah sebagian kunci kalau tidak ingin dipersamakan dengan konvensional. Kesesuaian dan ketaatan ini kemudian akan melahirkan budaya dan keputusan organisasi yang berdasarkan nilai agama, taat hukum, lebih terencana, lebih terukur dan hati-hati (*prudent*).

Kita tentu tak ingin kembali dikejutkan oleh beberapa kasus penyalahgunaan dana nasabah atau kasus hukum lain yang ter-

nyata melibatkan karyawan bank syariah. Kasus memalukan tersebut cukup memberi pelajaran adanya celah ketidaksempurnaan yang mesti kita perbaiki terkait moralitas dan pengawasan di lembaga keuangan syariah.

Terkait etika, sikap amanah dan *shiddiq* haruslah melandasi praktisi bank syariah yang tercermin dari integritas karyawan. Demikian pula *expertise* dan profesionalitas (*fathānah*) dalam menjalankan perbankan dengan memahami baik *maqashid*, prinsip, maupun praktek keuangan berkeadilan syariah, serta komitmen kuat untuk melaksanakannya secara konsisten. Kemampuan ini kemudian dibingkai dengan menjalankan peran *team work* baik internal maupun dalam mendukung masyarakat (*tabligh*).

Karakter-karakter inilah yang harusnya bersenyawa dalam setiap diri praktisi syariah. Dalam tata organisasi, pengelolaan SDI dengan seperangkat insentif disinsentif atau *reward-punishment* juga mesti berlandaskan prinsip keadilan (*adālah*) sesuai syariat. Hal inilah yang memotivasi pekerja untuk bisa bergerak bersama memperbaiki diri, berlomba dalam kebaikan, berusaha mencapai tujuan organisasi yang optimal.

Lembaga keuangan syariah dituntut untuk terus menerus melakukan peningkatan kapasitas keahlian (*expertise*) yang sesuai syariat, konstan melakukan *recharging* kepribadian dan spiritualitas; bisa melalui pengajaran, majlis ilmu, pelatihan dan pengembangan serta peningkatan karir terhadap sumber daya insaninya.

Dalam periode ini, perbankan syariah perlu mencontoh kenabian fase Mekkah (penguatan spiritualitas) sambil menyongsong fase Madinah (pertumbuhan) sekaligus. Demikian halnya SDI syariah, sebagai orang beriman haruslah meneladani sifat-sifat ketuhanan yang luhur.

Tujuan akhir yang diharapkan adalah bahwa lembaga keuangan dan praktisi semakin berperan memberi pelayanan keuangan yang berusaha memenuhi aspek *syar'i*. Ke depan, perbankan syariah harus mampu mencetak kader syariah yang profesional dan berbudi, bahkan bisa jadi *role model* pengelolaan sumber daya insani. Lembaga syariah bisa berperan layaknya 'pesantren' dimana proses pendidikan (*tarbiyah*) serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat bersenyawa dan beriringan. *Wallahu a'lam.*